

Kumawula, Vol.7, No.2, Agustus 2024, Hal 408 – 414

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i2.52308>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia *online* di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

PEMETAAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK GEMPA DI KABUPATEN CIANJUR

Candradewini Candradewini^{1*}, Budiman Rusli², Nina Karlina³, Dedi Soekarno⁴,
Riki Satia Muharram⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Departemen Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran

*Korespondensi: candradewini@unpad.ac.id

ABSTRACT

The need for land for the relocation of housing for residents affected by the earthquake disaster in Cianjur Regency has not yet been able to meet the needs as it should. This PPM activity aims to be an effort to overcome problems to develop science and meet community needs. The PPM method carried out by the author is Participatory Action Research (PAR). Various policies related to housing and settlement development have been socialized to various stakeholders. The results showed that the need for housing and settlement development for residents affected by the earthquake disaster in Cianjur Regency has not yet been met to the fullest. This is evident from the still need for labor and construction materials in the construction of permanent housing, land provision for relocation, building safety, contingency plans, and documents or SOPs for disaster management. Based on this, it can be concluded that the Cianjur Regency Government has made various efforts to meet these needs, including the construction of Permanent Housing (Huntap). However, these efforts still need to be improved to meet the needs of residents affected by the earthquake to the fullest.

Keywords: *Needs Mapping; Housing and Settlement Development; Communities Affected by the Earthquake*

ABSTRAK

Kebutuhan tanah untuk relokasi perumahan bagi warga terdampak bencana gempa di Kabupaten Cianjur masih belum dapat memenuhi kebutuhan sebagaimana mestinya. Kegiatan PPM ini bertujuan sebagai salah satu upaya mengatasi masalah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode PPM yang dilakukan oleh penulis adalah Participatory Action Research (PAR). Berbagai kebijakan terkait pembangunan perumahan dan permukiman telah disosialisasikan kepada berbagai stakeholders. Hasilnya, kebutuhan pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Cianjur masih belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kebutuhan tenaga kerja dan bahan bangunan dalam pembangunan hunian tetap, penyediaan tanah untuk relokasi, keselamatan bangunan, Rencana Kontigensi, dan dokumen atau SOP penanganan bencana. Kesimpulannya Pemerintah Kabupaten

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 05/01/2024
Diterima : 26/04/2024
Dipublikasikan : 22/07/2024

Cianjur berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan berbagai cara, diantaranya dengan pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Namun, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar kebutuhan masyarakat terdampak gempa dapat terpenuhi secara maksimal.

Kata Kunci: Pemetaan Kebutuhan; Pembangunan Perumahan dan Permukiman; Masyarakat Terdampak Gempa

PENDAHULUAN

Kabupaten Cianjur mengalami gempa bumi berkekuatan 5,6 SR yang berlokasi di sebelah Barat Daya Kota Cianjur. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 November 2022 tersebut berlangsung dalam kurun waktu 1 menit 18 detik pada pukul 13.21 WIB. Dari hasil monitoring BMKG ditemukan bahwa telah terjadi gempa susulan sebanyak 437 kali (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2023).

Diketahui bahwa dari data BPBD Kabupaten Cianjur sampai dengan 7 Desember 2022, bencana gempa bumi tersebut telah mengakibatkan adanya korban jiwa sebanyak 334 orang meninggal dunia, 44 orang luka ringan, dan 593 orang luka berat. Selain korban jiwa, gempa tersebut juga menyebabkan 53.408 rumah rusak yang terdiri dari 25.256 rumah rusak ringan, 15.196 rusak sedang dan 12.956 rusak berat (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2023).

Bencana telah merusak pembangunan, menghancurkan usaha, dan meningkatkan kemiskinan terutama bagi mereka yang sudah miskin. Selain itu, dalam lingkup nasional bencana juga menghancurkan investasi dan infrastruktur serta menguras anggaran nasional dan dana pembangunan internasional (Sanderson, 2000). Dalam kaitannya dengan bencana gempa bumi Cianjur, lokasi terdampak gempa bumi tersebar di 16 kecamatan yaitu, Karangtengah, Kecamatan Cianjur, Warungkondang, Sukaluyu, Cilaku, Gekbrong, Cugenang, Cibeber, Sukaresmi, Pacet, Ciranjang, Bojongpicung, Cikalong Kulon, Mande, Cipanas, dan Haurwangi (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2023).

Berdasarkan data hingga Maret 2023 persentase kerusakan terbesar yang diakibatkan

oleh bencana gempa bumi adalah di sektor perumahan yang mencapai 70,55% (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2023). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak agar bisa bersama-sama membangun kembali sektor perumahan menjadi lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.

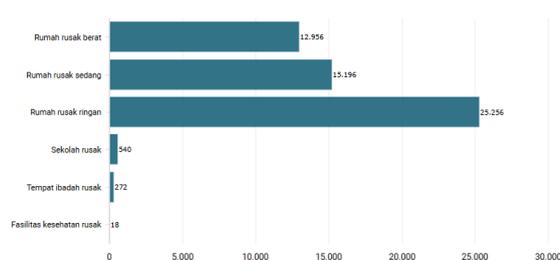
Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur memanfaatkan pemulihan dan rekonstruksi pascabencana untuk membangun masyarakat dan meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengurangan biaya. Secara khusus, inisiatif revitalisasi perumahan dan masyarakat dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif sesuai dengan kekhasan budaya lokal sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana. Pembangunan kembali perumahan dilakukan dengan perbaikan permukiman berdasarkan prinsip konstruksi yang lebih baik dan aman serta memperhatikan standar teknis bangunan yang sehat dan layak (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2023).

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan perumahan dan permukiman harus terus dikembangkan dan ditingkatkan secara menyeluruh, tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan (Karlina, Rusli, Muhtar, & Candradewini, 2020). Perumahan dan kawasan permukiman merupakan suatu sistem terpadu yang terdiri atas pembangunan, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pemeliharaan, perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan lahan, sistem pembiayaan dan pembiayaan, serta peranan Komunitas. Penatausahaan perumahan dan kawasan permukiman meliputi kegiatan perencanaan,

pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan, termasuk pengembangan kelembagaan, sistem pendanaan dan pembiayaan, serta pengembangan masyarakat secara terkoordinasi dan terpadu (UU RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Berdasarkan data Kementerian PUPR (2023), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat telah menyelesaikan pembangunan Rumah Permanen (Huntap) Tahap I Pasca Gempa Bumi di Cianjur pada akhir tahun 2022. Masyarakat terdampak akan segera menempati 200 Rumah Permanen Tahap I. unit yang dibangun di Kecamatan Cilaku dengan teknologi Rumah Instan Sehat Sederhana (RISHA). Kementerian PUPR tengah melaksanakan rekonstruksi Huntap tahap I sesuai dengan lahan yang disediakan Pemkab Cianjur untuk merelokasi masyarakat terdampak yang tinggal di zona merah sesar Cugenang.

Sementara itu, berdasarkan Kusnandar (2022), jumlah bangunan rusak akibat gempa Cianjur per 7 Desember 2022, rinciannya sebagai berikut.



Gambar 1. Daftar Kerusakan akibat Gempa Cianjur per 7 Desember 2022

(Sumber: <https://databoks.katadata.co.id>, 2022)

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan pihak pemerintah Kabupaten Cianjur dan beberapa kepala desa serta perwakilan desa yang terkena bencana gempa bumi diperoleh informasi bahwa penyediaan kebutuhan tanah untuk relokasi perumahan bagi warga terdampak bencana gempa masih belum dapat memenuhi kebutuhan sebagaimana mestinya. Rekonstruksi pasca

bencana di bidang infrastruktur merupakan hal krusial untuk membantu pemulihan kehidupan masyarakat (Yulianto, Bahar & Pranoto, 2023). Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini bertujuan sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan memenuhi kebutuhan masyarakat.

METODE

Metode PPM yang dilakukan oleh penulis adalah Participatory Action Research (PAR). PAR merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan praktis masyarakat, pembelajaran dalam proses produksi pengetahuan, dan perubahan sosial keagamaan (Afandi, dkk 2022). Metode ini sebagai upaya membangun kolaborasi antara Mahasiswa, Dosen dan berbagai elemen masyarakat (Solihah, 2020).

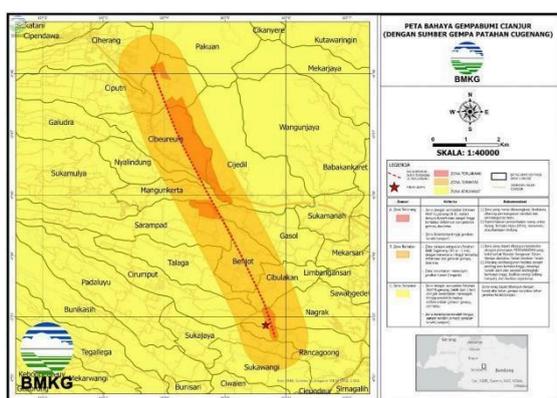
Gagasan-gagasan yang bersumber dari masyarakat menjadi landasan dalam pelaksanaan metode PPM PAR. Oleh karena itu, Mekanisme kerja PAR dimulai dengan kegiatan memperhatikan ide-ide dari masyarakat yang masih terfragmentasi dan belum sistematis. Dalam hal ini pemetaan awal merupakan sarana untuk memahami masyarakat agar penulis mudah memahami realitas permasalahan dan hubungan sosial yang muncul. Hal ini memfasilitasi akses ke masyarakat baik melalui pemain kunci maupun melalui komunitas akar rumput yang mapan seperti kelompok kebudayaan, kelompok ekonomi maupun kelompok keagamaan (Afandi, dkk 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan langkah kerja dengan menggunakan pendekatan PAR, maka penulis menguraikan hasil dan pembahasan secara khusus berkaitan dengan pemetaan awal kebutuhan pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Cianjur.

1. Pengumpulan Data Awal

Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap, detail dan menyeluruh terkait realitas, situasi, dan kondisi sosial secara objektif, maka penulis mengumpulkan berbagai dokumen kebijakan, dan informasi termasuk berita yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan permukiman untuk masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Cianjur.



Gambar 2. Peta Bahaya Gempa Bumi Cianjur (Dengan Sumber Gempa Patahan Cugenang)

(Sumber: bmg.go.id)

Adapun menurut BMKG (2023), menunjukkan bahwa:

- Zona Merah atau dikenal juga dengan sebutan “Zona Terlarang” mempunyai “batas” sesar aktif yang mengalir 0 – 10 meter ke kiri dan ke kanan tegak lurus garis sesar. Zona ini juga dinilai sangat rentan terhadap deformasi dan getaran gempa serta sangat rentan terhadap longsor.
 - Kawasan harus dikosongkan / bangunan yang sudah ada dipindahkan, pembangunan baru atau renovasi dilarang.
 - Pemanfaatan kawasan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), monumen, atau kawasan lindung diprioritaskan.
 - Kawasan Terlarang seluas 2,63 km² terdiri dari 12 desa dari 4 kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Cianjur

termasuk sebagian dari Desa Nagrak; Kecamatan Pacet meliputi sebagian Desa Ciherang dan Ciputri; Kecamatan Cugenang meliputi sebagian Desa Benjot, Sarampad Cibulakan, Gasol, Mangunkarta, Cijedil, Cibeureum, dan Nyalindung.

- Zona Oranye (Restricted Zone) merupakan kawasan yang berbatasan dengan Sesar Aktif Cugenang 10 – 1.000 meter ke kiri dan kanan tegak lurus garis sesar, serta merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap deformasi dan getaran gempa bumi, dan/atau merupakan daerah dengan tingkat kerawanan sedang terhadap pergerakan tanah (longsor).
 - Kawasan ini dapat dibangun dengan persyaratan yang sangat ketat terhadap standar bangunan tahan gempa dan/atau gempa.
 - Fasilitas yang sangat penting dan berisiko tinggi, seperti sekolah bertingkat, pembangkit listrik (kilang minyak), rumah sakit, dan lain-lain, dilarang dibangun.

- Zona Kuning (Zona Bersyarat) merupakan wilayah dengan batas sesar aktif Cugenang lebih dari 1000 meter ke kiri dan kanan tegak lurus terhadap tumbukan sesar, serta merupakan zona dengan kerentanan sedang hingga rendah terhadap deformasi dan getaran gempa bumi serta zona kerentanan rendah hingga sangat rendah terhadap pergerakan tanah (longsor).
 - Zona kuning ini dapat dibangun dengan konstruksi tahan gempa dan/atau tahan pergerakan tanah/longsor.

2. Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Bagi Masyarakat Terdampak Gempa di Kabupaten Cianjur

Tim PPM melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan perumahan dan

permukiman bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapperida) Kabupaten Cianjur, BPBD Kabupaten Cianjur, Dinas PKP Kabupaten Cianjur, Dinas PUTR Kabupaten Cianjur, Kepala Desa dan perwakilan masyarakat terdampak bencana gempa bumi (Desa Mangunkerta, Desa Sarampad, Desa Nagrak).

Beberapa kebijakan terkait pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Cianjur adalah:

- a. UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. PP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- c. Perbup Kabupaten Cianjur Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Cianjur.
- d. Perbup Kabupaten Cianjur Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan Layak Huni Kabupaten Cianjur.
- e. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 648/Kep.159–Bappelitbangda/2022 Tahun 2022 Tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Cianjur.
- f. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Cianjur Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- g. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 098.05/Kep.118–Bappeda/2017 Tentang Kelompok Kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.
- h. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Penyerahan, Pengelolaan Prasarana dan Utilitas Perumahan.
- j. Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan oleh Pengembang.
- k. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Cianjur.
- l. Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan Oleh Pengembang.
- m. Fungsi, Tugas, dan Tata Kerja Unit Organisasi di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Cianjur.

3. Pemetaan Awal Kebutuhan Pembangunan Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Terdampak Gempa di Kabupaten Cianjur

Tabel 1. Pemetaan Awal Kebutuhan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Bagi Masyarakat terdampak Gempa di Kabupaten Cianjur

No.	Kriteria	Hasil
1	Kebutuhan tenaga kerja dan bahan bangunan dalam	Kebutuhan tenaga kerja dan bahan bangunan yang serentak mengakibatkan biaya tenaga kerja

	pembangunan hunian tetap	serta bahan bangunan menjadi mahal dan sulit sehingga menghambat penyelesaian pembangunan hunian tetap.
2	Penyediaan tanah untuk relokasi	Proses negosiasi dan pembebasan tanah yang tidak mudah menyebabkan penyediaan tanah untuk pembangunan kembali masih kurang.
3	Keselamatan bangunan	Penguatan di struktur pondasi perlu ditingkatkan sehingga pembangunan hunian tetap menjadi konstruksi tahan gempa.
4	Rencana Kontigensi	Perlu dibuat rencana kontigensi yang berisi skenario-skenario.
5	Dokumen atau SOP penanganan bencana	Perlu menyediakan dokumen atau SOP terkait dengan penanganan bencana khususnya gempa bumi yang terjadi di Cianjur sehingga jelas siapa harus melakukan apa terutama pada saat kejadian baru saja terjadi.

(Sumber: Hasil analisis, 2023)

Proses pemetaan awal kebutuhan pembangunan perumahan dan pemukiman bagi

masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Cianjur ditinjau dari lima kriteria yaitu kebutuhan tenaga kerja dan bahan bangunan dalam pembangunan hunian tetap, penyediaan tanah untuk relokasi, keselamatan bangunan, rencana kontigensi, dan dokumen atau SOP penanganan bencana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait dengan pemetaan awal kebutuhan pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Cianjur, maka telah dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terdampak gempa tersebut. Pada perkembangannya, telah dilakukan pembangunan perumahan yang dikenal dengan Hunian Tetap (Hunatap). Namun demikian, masih perlu penyediaan dan peningkatan khususnya dalam hal kebutuhan tenaga kerja dan bahan bangunan dalam pembangunan hunian tetap, penyediaan tanah untuk relokasi, keselamatan bangunan, Rencana Kontigensi, dan dokumen atau SOP penanganan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., dkk (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- BMKG. (2023, Januari 08). Peta Bahaya Gempabumi Cianjur (dengan Sumber Gempa Patahan Cugenang). Retrieved from BMKG: <https://www.bmkg.go.id/berita/?p=peta-bahaya-gempabumi-cianjur-dengan-sumber-gempa-patahan-cugenang&lang=ID>
- Karlina, N., Rusli, B., Muhtar, E. A., & Candradewini, C. (2020). Sosialisasi Pembangunan Perumahan & Permukiman Berbasis Komunitas dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan,

- Kabupaten Bandung. Jurnal Kumawula, 154-162. doi:<https://doi.org/10.36080/jjdr.v1i1.107>.
- Kementerian PUPR. (2023, Maret 10). Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan 200 Unit Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Gempa Cianjur. Retrieved from Kementerian PUPR: <https://www.pu.go.id/berita/kementerian-pupr-selesaikan-pembangunan-200-unit-hunian-tetap-bagi-masyarakat-terdampak-gempa-cianjur>
- Kusnandar, V. B. (2022, Desember 08). Update: Jumlah Bangunan Rusak akibat Gempa Cianjur per 7 Desember 2022. Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/08/update-jumlah-bangunan-rusak-akibat-gempa-cianjur-per-7-desember-2022>
- Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011. Jakarta: Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Cianjur. (2023). Dokumen R3P Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur: Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Solihah, Ratnia. 2020. "PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PROGRAM CITARUM HARUM DI DESA KUTAMANDIRI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG." *Jurnal Kumawula* 29-47. doi:<http://10.24198/kumawula.31i1.24860>.
- UU RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2011).
- Yulianto, Sugeng, Fauzi Bahar, and Sugimin Pranoto. 2023. "Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Perumahan dan Pascabencana Tsunami Pandeglang untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak." *Jagratar: Journal of Disaster Research* 1 (1): 9-16.